

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Nirmawati Situmorang



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX REVENUE ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

By

NIRMAWATI SITUMORANG

Economic growth is a major macroeconomic problem that will always be faced by a country in achieving development goals. To carry out development requires no small amount of funds, government efforts are needed to provide funds to encourage economic growth. This study aims to analyze the effect of tax revenue, domestic investment, foreign direct investment, and labor on Indonesia's economic growth.

The analytical method used is the Error Correction Model (ECM) to determine the effect in the short term and long term. The analysis used secondary data in the form of time-series data from 1999-2019. The estimation results using the ECM model all independent variables are jointly significant on economic growth in the short and long term. Partially, the ECM method shows that in the short term, the variables of tax revenue, domestic investment and foreign direct investment have a significant effect on economic growth in Indonesia, while labor has an insignificant effect on economic growth in Indonesia. Meanwhile, in the long term, the variables of tax revenue, domestic investment and labor have a significant effect on economic growth in Indonesia, while foreign direct investment has no significant effect on economic growth in Indonesia.

Keywords: Economic Growth, Tax Revenue, Domestic Investment, Foreign Direct Investment, Labor, ECM.

ABSTRAK

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh

NIRMAWATI SITUMORANG

Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit, dibutuhkan usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) untuk mengetahui pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Analisis digunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1999-2019. Hasil estimasi menggunakan model ECM semua variabel bebas secara bersama-sama signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara parsial metode ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang variabel penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, ECM.

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Oleh

Nirmawati Situmorang

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**

pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**: PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: Nirmawati Situmorang

No. Pokok Mahasiswa

: 1541021008

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ambya, S.E., M.Si.

NIP. 19590719 198703 1 002

2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. ✕

NIP. 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ambya, S.E., M.Si

Penguji I : Dr. Nairobi, S.E., M.Si

Penguji II : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Agustus 2021



Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be "Ambya" and another that appears to be "Nairobi".

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2021



Nirmawati Situmorang

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Suka Bhakti, pada tanggal 30 Maret 1998 sebagai anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Bungaran Situmorang dan Ibu Rotua Manullang. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 01 Suka Jaya dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Gedung Aji Baru yang diselesaikan pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Xaverius Pringsewu hingga lulus pada tahun 2015. Setelah itu pada tahun yang sama yaitu tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Tahun 2017 bulan Mei, penulis melaksanakan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Bursa Efek Indonesia, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Otoritas Jasa Keuangan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) dan Selain itu penulis juga pernah menjadi anggota PKMK (Persekutuan Keluarga Mahasiswa Kristen) FEB Unila. Lalu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode pertama tahun 2017 selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari di Desa Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

MOTO

“I can do all this through him who gives me strength”
(Philippians 4:13)

“Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer”
(Romans 12:12)

“Be faithful in small things because it is in them that your strength lies”.
(Mother Teresa)

“Lakukan hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan”
(Eleanor Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak Bungaran Situmorang dan Ibu Rotua Manullang atas segala kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, dan segala sesuatunya yang telah diberikan kepada penulis.

Kakak dan adik-adikku tersayang Dame Disna Otriana Situmorang, Antonius Situmorang dan Kevin Andrian Situmorang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti serta doa.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, bantuan serta doa.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan nasihat dan masukan yang bermanfaat.
2. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat.
3. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

4. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, saran dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Seluruh Dosen dan Staf administrasi di Jurusan Ekonomi Pembangunan atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Bungaran Situmorang dan Rotua Manullang yang telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat yang telah membesarkan dan merawatku selama ini, serta senantiasa memberikan kasih sayang, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta tak pernah putusnya doa yang kalian panjatkan kepada Tuhan untuk anakmu selama ini.
8. Kakak dan adik-adikku tersayang, Dame Disna Otriana Situmorang, Antonius Situmorang dan Kevin Andrian Situmorang terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan.
9. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang super solid.
10. Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk selanjutnya Terima Kasih.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2021
Penulis,

Nirmawati Situmorang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	16
B. Penerimaan Pajak	27
C. Investasi	31
1. Penanaman Modal Dalam Negeri	37
2. Penanaman Modal Asing	38
D. Tenaga Kerja	40
E. Penelitian Terdahulu	46
F. Kerangka Pemikiran	49
G. Hipotesis.....	52
III METODE PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	54
D. Alat Analisis	55
E. Metode Analisis Data.....	57
1. Uji Stasioner (<i>Unit Root Test</i>).....	57

2.	Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang).....	58
3.	Model Koreksi Kesalahan <i>Error Correction Model</i> (ECM)...	59
4.	Uji Asumsi Klasik	60
	1) Uji Normalitas	60
	2) Uji Heteroskedastisitas	60
	3) Uji Multikolinieritas	61
	4) Uji Autokorelasi	62
5.	Pengujian Hipotesis	62
	1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	63
	2) Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	64
	3) Uji Koefisien Determinasi (R^2 atau <i>R-squared</i>)	64

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Pengujian.....	66
	1. Hasil Uji Stasioneritas (Uji Unit <i>Root</i>).....	66
	2. Hasil Uji Kointegrasi	67
	3. Hasil Estimasi <i>Error Correction Model</i> (ECM)	68
	4. Hasil Uji Asumsi Klasik	70
	1) Hasil Uji Normalitas	70
	2) Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
	3) Hasil Uji Multikolinieritas	71
	4) Hasil Uji Autokorelasi	71
	5. Uji Hipotesis.....	72
	1) Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	72
	2) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	76
	3) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2 atau <i>R-squared</i>)	77
B.	Pembahasan	77
	1. Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	77
	2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.....	82
	3. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	87
	4. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	90

V PENUTUP

A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) di Indonesia Tahun 2015-2019	4
2. Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) di Indonesia Tahun 2015-2019	5
3. Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2015-2019	8
4. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	46
5. Jenis dan Sumber Data	53
6. Operasionalisasi Variabel	55
7. Hasil Uji Stasioner Dengan Pendekatan <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF) Pada Tingkat level.....	66
8. Hasil Uji Stasioner Dengan Pendekatan <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF) Pada Tingkat <i>First Difference</i>	67
9. Hasil Uji Residual Pada Tingkat Level (Uji) Kointegrasi Engel-Granger	67
10. Tabel Hasil Estimasi Jangka Pendek <i>Error Correction Model</i> (ECM)...	68
11. Tabel Hasil Estimasi Jangka Panjang <i>Error Correction Model</i> (ECM)..	69
12. Hasil Uji Normalitas	70
13. Hasil Uji Heteroskedasitas Menggunakan <i>Uji Breusch-Pagan-Godfrey</i>	70
14. Hasil Uji Multikolinearitas	71

15. Hasil Uji Autokorelasi	71
16. Hasil Uji t-Statistik Jangka Pendek	72
17. Hasil Uji t-Statistik Jangka Panjang	74
18. Hasil Uji f-Statistik Jangka Pendek	76
19. Hasil Uji f-Statistik Jangka Panjang	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1999-2019	2
2. Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan Pengangguran (Juta Jiwa) di Indonesia tahun 2011-2019	10
3. Kurva Keseimbangan Dalam Pasar Tenaga Kerja	43
4. Kerangka Pemikiran	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja	101
2. Data Setelah Dilakukan Transformasi Dalam Bentuk Lin-Log.....	102
3. Tabel Distribusi t	103
4. Tabel Distribusi F	104
5. Hasil Uji Stasioneritas	105
6. Hasil Uji Kointegrasi	107
7. Hasil Estimasi Jangka Pendek ECM	108
8. Hasil Estimasi Jangka Panjang ECM	109
9. Uji Normalitas	109
10. Uji Heteroskedasitas	110
11. Uji Multikolinearitas	110
12. Uji Autokorelasi	111

I. PENDAHULUAN

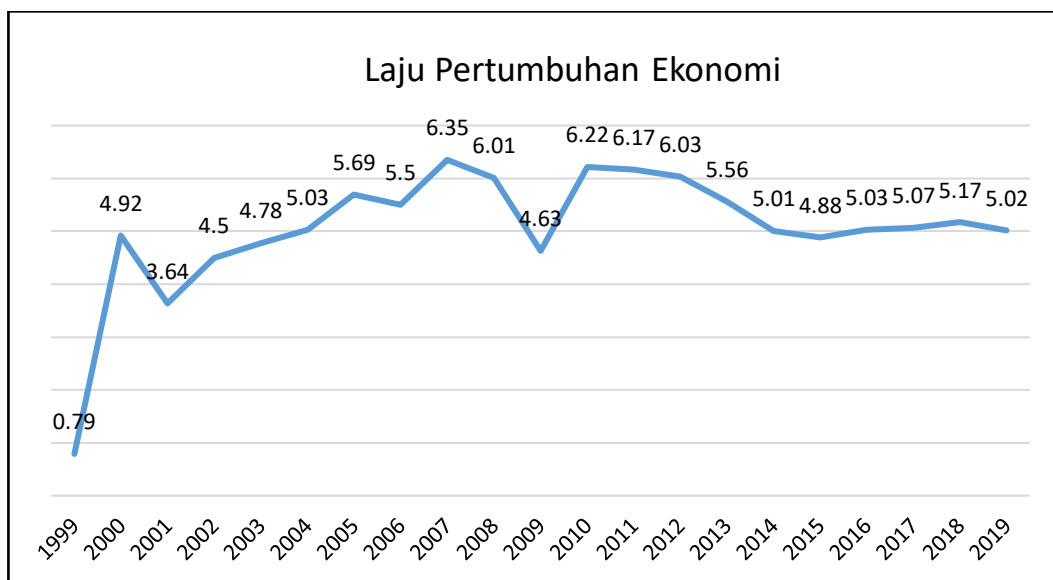
A. Latar Belakang

Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari waktu ke waktu (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi yang akan selalu dihadapi suatu negara. Masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang, terutama yang masih rendah taraf pembangunan dan kemakmurannya. Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dan kesuksesan pada suatu negara dalam mengendalikan kegiatan perekonomiannya

dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB)/GDP. Menurut Sukirno (2016) untuk memberikan gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (PDB riil). PDB riil mengukur semua nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu.

Gambar 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1999-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2019. Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa tren laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki angka yang cenderung berfluktuatif atau terjadi kenaikan dan penurunan. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,35 persen dan yang paling rendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 0,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen di tahun 2019 lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2 persen.

Perekonomian nasional selama beberapa periode mengalami pasang surut sebagai dampak dari perubahan lingkungan ekonomi yang berubah secara dinamis (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Dari dalam negeri, kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi penggunaan, kinerja ekspor impor Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga dialami sektor investasi. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih diperkuat dengan stabilnya permintaan domestik dengan didukung oleh inflasi yang terjaga. Dari sisi sektoral, penurunan kinerja perekonomian banyak terjadi di sektor primer dan sekunder. Lesunya sektor pertambangan serta menurunnya produktivitas sektor industri menjadi salah satu faktor penyumbanganya. Sementara sektor tersier tumbuh menguat, diantaranya sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor *real estate* (BPS, 2020).

Fluktuasi ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh. Menghadapi masalah tersebut perlunya campur tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menghindari kelambanan ini (Mankiw, 2018). Peran serta pemerintah dibutuhkan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroekonomi. Salah satu kebijakan makroekonomi yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian perekonomian adalah kebijakan fiskal. Dalam Kebijakan fiskal akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal

merupakan faktor kunci dalam keputusan kebijakan ekonomi, yang melibatkan peningkatan penerimaan pajak (Sukirno, 2016).

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak dapat berfungsi sebagai *budgetair*, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Menurut Resmi (2017) pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan mencapai lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam APBN.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) di Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Hibah	Total
2015	1.489,26	1.240,42	82,26	255,63	11,97	1.508,02
2016	1.539,17	1.284,97	82,59	261,98	8,99	1.555,94
2017	1.472,71	1.343,53	80,63	311,22	11,63	1.666,38
2018	1.618,10	1.518,79	78,14	409,32	15,56	1.943,67
2019	1.786,40	1.545,30	78,95	405,00	6,80	1.957,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, persentase penerimaan sektor pajak terhadap pendapatan negara selalu memberikan hasil diatas 70 persen. Tetapi pada kenyataannya penerimaan pajak Indonesia selalu mengalami *shortfall* atau pencapaian target penerimaan

pajak terhadap realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir hampir semuanya tidak tercapai. Dapat dilihat pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 1.577,55 triliun rupiah, namun realisasi hanya sebesar 1.332,06 triliun rupiah. Hal tersebut berpengaruh pada realisasi pendapatan yang diterima oleh negara. Selain itu, pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun mengalami defisit dalam anggaran pemerintah. Defisit merupakan total pengeluaran lebih besar dari penerimaannya.

Untuk membiayai pengeluarannya, pemerintah mengenakan berbagai jenis pajak kepada rumah tangga dan perusahaan. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Sukirno, 2015). Jenis-jenis pajak yang tergolong dalam pajak langsung adalah pajak pendapatan perseorangan dan pajak perusahaan. Sedangkan, pajak yang termasuk golongan pajak tidak langsung adalah pajak penjualan dan pajak impor atau ekspor.

Tabel 2.
Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah) di Indonesia Tahun 2015-2019

Rincian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Penghasilan (PPh)	602,31	666,21	646,79	749,98	770,29
- PPh Migas	49,67	36,10	50,32	64,70	59,08
- PPh Nonmigas	552,64	630,11	596,48	685,28	711,21
PPN dan PPnBM	423,71	412,21	480,72	537,27	532,91
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29,25	19,44	16,77	19,44	21,17
Cukai	144,64	143,53	153,29	159,59	172,33
Pajak Lainnya	5,57	8,10	6,74	6,63	7,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa kontribusi utama penerimaan perpajakan adalah berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Pada APBNP

2020, pemerintah menargetkan penerimaan PPh sebesar 670,38 triliun rupiah dan target PPN dan PPnBM sebesar 507,52 triliun rupiah. Untuk PPh, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan PPh Nonmigas yang ditargetkan mencapai 638,52 triliun rupiah atau turun 10,22 persen dari realisasi tahun 2019. Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemerintah menargetkan penerimaan sebesar 13,44 triliun rupiah atau turun 36,51 persen dari realisasi tahun 2019. Selain PPh dan PPN, pendapatan pajak dari cukai juga menjadi perhatian, dilihat selama tahun 2016-2019 pendapatan cukai selalu meningkat setiap tahunnya. Pada APBN 2019, Pemerintah memasang target penerimaan cukai sebesar 165,50 triliun rupiah atau tumbuh 3,70 persen dari 2018.

Penyebab realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak di Indonesia yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya peranan pajak. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Administrasi perpajakan dan reformasi sistem perpajakan sebagai komponen utama dalam usaha suatu negara dalam menghimpun pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ali dkk, (2018) mereka berpendapat bahwa kedua usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi masalah toleransi pajak dan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penerimaan pajak yang ada, hampir keseluruhan mendukung pendapat bahwa penerimaan pajak memang memberikan dampak yang positif, seperti yang diungkapkan oleh Ali dkk, (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga dengan penelitian oleh Nonvide dan Amegnaglo

(2017) Hasil menunjukkan pengaruh positif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian mereka memberi rekomendasi bahwa kebijakan fiskal harus mempromosikan investasi.

Kekurangan modal mengurangi kepesatan pembangunan perekonomian dan menyebabkan kesukaran kepada suatu negara untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Perkembangan dan modernisasi suatu perekonomian memerlukan modal yang sangat banyak. Infrastruktur harus dibangun, sistem pendidikan harus dikembangkan dan kegiatan pemerintah harus diperluas. Dan yang lebih penting berbagai jenis kegiatan perusahaan dan industri modern harus dikembangkan. Pemerintah dan swasta memerlukan modal yang banyak untuk mewujudkan modernisasi di berbagai kegiatan ekonomi. Usaha pemerintah untuk mendorong pihak swasta menggunakan tabungan yang tersedia untuk melakukan penanaman modal merupakan hal penting yang perlu disediakan (Sukirno, 2016).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi atau penanaman modal. Investasi adalah salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang, dan dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Hubungan pertumbuhan dan investasi sangat jelas, negara yang lebih banyak memakai PDB-nya untuk investasi cenderung mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi (Mankiw, 2018). Menurut Sukirno (2016) Investasi disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Pemerintah telah menerbitkan undang-undang no. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia baik dengan modal dari dalam negeri (PMDN) ataupun modal dari luar negeri (PMA). Investasi di Indonesia terdiri dari dua jenis investasi yaitu, investasi yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah dan investasi oleh pihak luar negeri.

Tabel 3.
Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (Miliar Rp)	Proyek	Investasi (Juta US\$)
2015	5.100	179.465,9	17.738	29.275,9
2016	7.511	216.230,9	25.321	28.964,1
2017	8.838	262.350,5	26.257	32.239,8
2018	10.815	328.604,9	21.972	29.307,9
2019	30.451	386.498,4	30.354	28.208,8
Total	62.715	1.373.150,6	121.642	147.996,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Berdasarkan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai investasi PMDN di Indonesia selama tahun 2015-2019 tercatat selalu mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 1.373.150,6 miliar rupiah. Peningkatan nilai investasi domestik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah proyek yang menyerap nilai investasi tersebut, jumlah proyek yang terserap mengalami peningkatan sebanyak 62.715 proyek. Sedangkan perkembangan nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia terlihat mengalami fluktuasi. Investasi PMA di Indonesia selama tahun 2015-2019 dengan rata-rata nilai sebesar 147.996,5 Juta US\$, jumlah proyek yang terserap sebanyak 121.642 proyek. Namun dari rata-rata perkembangan penanaman modal di Indonesia, nilai PMA lebih tinggi dibandingkan PMDN. Karena nilai rata-rata PMA

lebih besar, sehingga PMA lebih terasa dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan rata-rata PMDN.

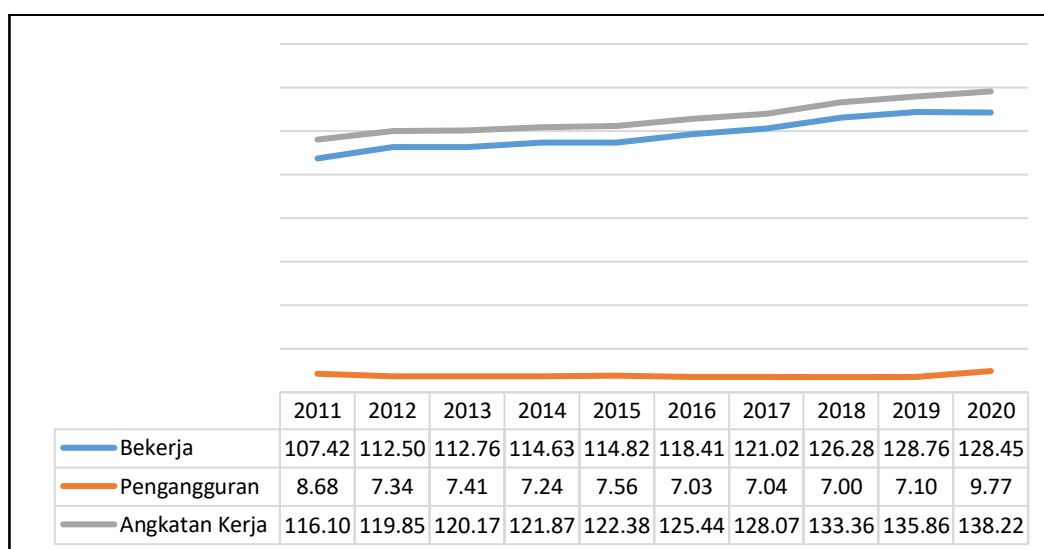
Penghalang dalam gairah berinvestasi adalah kurang sempurnanya penegakan hukum dan ketertiban, ketidakstabilan politik, keadaan moneter yang kacau, kurangnya kesinambungan kehidupan perekonomian, meluasnya sistem famili yang menguras sumber, dan tersumbatnya prakarsa pribadi dan sistem jangka waktu guna-usaha atas tanah (Jhinghan, 2016). Dalam meningkatkan investasi PMDN maupun PMA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguat daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hodrob (2017) berpendapat bahwa investasi domestik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian ini didukung oleh Emmanuel dan Kehinde (2018) mereka berpendapat bahwa investasi domestik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ali & Hussain (2017) mereka berpendapat investasi asing memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dan penelitian ini didukung oleh Hlavacek dan Bal-Domanska, (2016) yang menyimpulkan bahwa investasi asing memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan bagian penting dari sebuah kegiatan ekonomi, yaitu

melaksanakan produksi (Aryanti dkk, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional. Sumber daya manusia harus berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. SDM yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan dari angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja dapat mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja (BPS, 2019).

Gambar 2.
Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja dan pengangguran (Juta Jiwa) di Indonesia tahun 2011-2019.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Pada gambar 2 diatas menunjukkan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdiri dari dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja juga terus meningkat, yaitu dari 107, 42 juta jiwa pada tahun 2011 menjadi 128,76 juta jiwa pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kontribusi lapangan usaha

pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada peringkat ketiga dengan persentase sebesar 12,72 persen. Kontribusi lapangan usaha terhadap PDB yang tertinggi adalah industri pengolahan sebesar 19,7 persen dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,01 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak memiliki produktivitas yang tinggi, tetapi lapangan usaha ini menjadi sektor dalam penyerapan tenaga kerja yang baik.

Negara sedang berkembang (NSB) dicirikan memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah. Prinsip produktivitas marginal yang semakin menurun, prinsip ini menyatakan bahwa jika ada penambahan kuantitas pada salah satu input variabel (tenaga kerja), sedangkan kuantitas input-input lainnya tetap. Maka pada suatu titik tertentu produk marginal yang dihasilkan dari adanya tambahan input variabel tersebut akan menurun. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah disebabkan tidak adanya atau kurangnya input komplementer seperti modal fisik atau manajemen sumber daya manusia yang baik (Arsyad, 2017). Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lebih menekankan pentingnya akumulasi modal fisik. Ketergantungan pada pembentukan modal manusia yaitu, proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara (Jhinghan, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakari (2017), menyimpulkan bahwa tenaga kerja memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

dengan meningkatkan alokasi dana pendidikan agar kualitas tenaga kerja meningkat, memberikan pelatihan dan keterampilan bahasa asing kepada tenaga kerja. Selain itu pembagian kerja jelas sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini akan berfokus kepada analisis pengaruh penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang berkontribusi paling besar pada sistem penerimaan negara di Indonesia. Dari segi penerimaan negara, pajak merupakan sumber pendanaan yang berpengaruh besar dalam sumber pengeluaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi permasalahan dari sumber penerimaan pajak terkait dari target penerimaan pajak yang kerap kali dalam realisasinya tidak tercapai pada tiap tahunnya. Sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran dimana penerimaan perpajakan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu untuk memenuhi dalam membiayai pengeluaran pemerintah karena modal yang terbatas. Dalam menekan terjadinya defisit anggaran diperlukan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan yang bersumber dari bertambahnya masukan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing serta tenaga kerja.

Berdasarkan fakta tersebut belum dapat diketahui bahwa dengan naiknya penerimaan pajak maka akan naik pula pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja, dengan

meningkatnya penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja belum tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data penerimaan pajak mengalami peningkatan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dan 2009 sampai dengan 2019, hal ini dapat dilihat bahwa pajak dapat mengurangi beban pembiayaan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Penanaman modal dalam negeri mengalami fluktuasi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, hal ini menyebabkan penanaman modal dalam negeri belum mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan investasi secara maksimal. Penanaman modal asing mengalami fluktuasi 12 kali pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, hal ini memberikan gambaran bahwa investasi asing tidak mengalami peningkatan secara terus-menerus. Tenaga kerja yang bekerja pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah pekerja, namun peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja tersebut di sertai dengan peningkatan terhadap jumlah angkatan kerja dan pengangguran setiap tahunnya. Serta perekonomian sektor pertanian lebih mendominasi dibandingkan perekonomian sektor modern, sehingga menyebabkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian masih belum secara optimal. Beberapa variabel menunjukkan bahwa ada beberapa data yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2019?

2. Apakah pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2019?
3. Apakah pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2019?
4. Apakah pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2019?
5. Apakah pengaruh penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999-2019

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 1999-2019?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Dapat menjadi alasan untuk pertimbangan bagi para pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dalam hal pembangunan ekonomi sebagai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Dapat digunakan sebagai informasi objek penelitian dan menambah wawasan mengenai pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam teori makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi di pandang sebagai masalah dalam makroekonomi jangka panjang (Sukirno, 2016). Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuaan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2016).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak (Arsyad, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata akan sekaligus diraih pada beberapa negara yang mampu membuktikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang harus diambil adalah strategi pembangunan yang mampu membuat

pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan cepat, yang hasilnya bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya saja, bukan juga strategi yang menitik beratkan pada distribusi yang merata, tetapi kedua hal tersebut harus dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang secara bersama-sama sehingga hasil yang didapatkan lebih baik (Todaro, 2011).

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan Adam Smith, pengembangan hak milik (*property rights*), spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis (Arsyad, 2017). Adam Smith, membagi sejarah peradaban manusia dalam empat tahapan yaitu tahap berburu (*hunting*), tahap beternak (*pastoral*), tahap pertanian (*agriculture*), dan tahap perdagangan (*commerce*). Smith juga menambahkan bahwa seiring dengan laju pertumbuhan perekonomiannya, masyarakat akan bergerak dari tahap masyarakat tradisional menuju tahap masyarakat modern yang kapitalis. Dalam pemikirannya, Smith mengkritik pandangan kaum merkantilisme. Menurut Smith, kepemilikan atas emas dan perak oleh suatu negara bukanlah suatu ukuran kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah bersumber pada “hasil kerja” suatu negara. Kekayaan nasional dapat dibentuk oleh dua hal yaitu, (1) ketrampilan dan penggunaan tenaga kerja secara efisien, dan (2) pertimbangan yang tepat antara tenaga kerja yang produktif dan tenaga kerja nonproduktif.

Proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Dalam aspek

pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yaitu:

- a. Sumberdaya alam yang tersedia, yang direpresentasikan oleh ketersediaan “tanah”. Menurut Smith, jika sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan terus memacu pertumbuhan output. Namun, pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam telah digunakan secara optimal.
- b. Sumberdaya manusia, yang direpresentasikan oleh jumlah penduduk. Sumber daya manusia memegang peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- c. Akumulasi modal yang dimiliki, menurut Smith, stok modal memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi. Stok modal dapat diidentikan sebagai “dana pembangunan”, cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung kepada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu, stok modal merupakan unsur produksi yang aktif menentukan tingkat pertumbuhan output.

Aspek lain dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Menurut Smith, pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi

akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan mendorong perkembangan teknologi.

2) Teori pertumbuhan Neo-klasik

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow menunjukkan adanya hasil yang semakin menurun dari tenaga kerja dan modal secara terpisah serta hasil konstan dari kedua faktor itu secara bersama-sama. Kemajuan teknologi menjadi faktor residu yang menjelaskan pertumbuhan jangka panjang, dan tingkat pertumbuhan menurut asumsi Solow dan para pemikir pertumbuhan neoklasik lainnya, ditentukan secara eksogen (dari luar) yang artinya bebas dari pengaruh faktor-faktor lainnya dalam model itu (Todaro, 2011).

Dalam bentuk yang lebih formal, penjelasan standar model pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}$$

Keterangan:

- Y = Produk Domestik Bruto
- K = Persediaan modal
- L = Tenaga kerja
- A = Mewakili produktivitas tenaga kerja yang tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen
- α = Melambangkan elastisitas output dalam kaitannya dengan modal (peningkatan persentase GDP sebagai hasil dari peningkatan sebesar 1% dalam modal manusia dan fisik).

Menurut Sukirno (2016), Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang lebih penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Sumbangan yang penting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan.

Pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori ini menunjukkan sebuah kenyataan yang cenderung diabaikan oleh Keynes yaitu

jika pada suatu periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan barang dan jasa. Namun, senada dengan Keynes, teori ini juga menganggap bahwa kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, meskipun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan mengalami kenaikan hanya jika terjadi kenaikan pengeluaran masyarakat (Arsyad, 2017).

Beberapa asumsi dalam teori Harrod Domar, yaitu:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh (*full utilization*)
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- d. Kecenderungan menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*)

Analisis Teori Harrod-Domar, dalam ekonomi dua sektor, investasi harus terus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat (Sukirno, 2016). Teori Harrod-Domar

tidak diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila ekonomi dari tiga atau empat sektor. Walau bagaimanapun berdasarkan teorinya dapat disimpulkan hal yang perlu berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang sedemikian, barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G_1 + (X - M)_1$ di mana $I_1 + G_1 + (X - M)_1$ sama dengan $(I + \Delta I)$.

4) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi akan memerlukan investasi baru.

Segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah

tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi (Sukirno, 2016).

5) Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makro ekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936. Dalam bukunya Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Selain menerangkan faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara dan keadaan yang menciptakan berbagai masalah, analisis makroekonomi juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Dalam analisis ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu

periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Investasi perusahaan-perusahaan
- c. Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah
- d. Ekspor

Keynes menekankan peran utama permintaan agregat dalam menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek (Mankiw, 2018). Keynes menyatakan bahwa pemerintah harus aktif mendorong permintaan agregat, ketika permintaan agregat terlihat tidak cukup untuk mempertahankan produksi pada tingkat pekerjaan penuhnya. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi karena gelombang pesimisme dan optimisme yang irasional. Ketika pesimisme melanda, rumah tangga mengurangi belanja konsumsi, dan perusahaan-perusahaan mengurangi belanja investasi. Hasilnya adalah permintaan agregat menurun, produksi berkurang, dan pengangguran meningkat. Sebaliknya, apabila optimisme terjadi, rumah tangga dan perusahaan-perusahaan meningkatkan belanja. Hasilnya permintaan agregat meningkat, produksi bertambah, dan timbul tekanan inflasi.

2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2011), beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1) Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk peningkatan *output* dan pendapatan di masa depan. Pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baru meningkatkan persediaan modal (*capital stock*) fisik suatu negara (total nilai riil neto semua barang modal fisik produktif) yang memungkinkan upaya mempertinggi tingkat *output* yang akan dicapai.

2) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk, dan akibatnya pada kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*), selama ini dipandang sebagai faktor positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti pekerja produktif yang lebih banyak, dan dengan jumlah penduduk yang besar secara menyeluruh akan memperbesar ukuran pasar dalam negeri.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi (*technological progress*), yang bagi banyak ekonom merupakan paling penting. Kemajuan teknologi dalam bentuknya yang paling sederhana merupakan hasil dari peningkatan cara melaksanakan tugas-tugas tradisional seperti menanam tumbuhan, membuat pakaian, atau membangun rumah. Terdapat klasifikasi dasar kemajuan teknologi: netral, hemat tenaga kerja (*labor saving*), dan hemat modal (*capital saving*).

3. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2016), untuk menghitung pendapatan nasional dapat dihitung menggunakan tiga cara perhitungan, yaitu:

- 1) Cara pengeluaran, pada cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu negara. Beberapa jenis pengeluaran agregat dalam sebuah perekonomian tersebut adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi) dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
- 2) Cara produk neto, dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian.
- 3) Cara pendapatan, dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan-pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlulah dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil (Sukirno, 2016). Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi ialah:

$$g = \frac{PNriil_1 - PNriil_0}{PNriil_0} \times 100$$

Di mana :

g = Tingkat pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan dalam persen

$PNriil_1$ = Pendapatan nasional untuk tahun dimana tingkat pertumbuhannya ekonominya dihitung

$PNriil_0$ = Pendapatan nasional pada tahun sebelumnya

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan total pendapatan dalam perekonomian dan juga total pengeluaran atas produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw, 2018).

B. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Resmi (2017), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Perbelanjaan dalam membiayai pengeluaran pemerintah diperlukan dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2016). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang

pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Dampak distorsi perekonomian membuat pentingnya peran pemerintah dalam upaya menjaga anggaran untuk tetap fokus pada pengeluaran anggaran sektor-sektor yang memiliki skala prioritas. Dalam pandangan ekonomi publik, prinsip penganggaran dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga prinsip anggaran berimbang menjadi sangat penting, karena seluruh pengeluaran berarti ditopang dari penerimaan pajak.

1. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Resmi, 2017), yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan,

sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

C. Investasi

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat

pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan juga sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2016). Investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa lebih banyak. Karena pengakumulasian modal memengaruhi produktivitas sehingga menunjukkan bahwa tingkat investasi yang tinggi menuntun pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Mankiw, 2018).

Pembentukan modal atau investasi sebagai kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. di satu pihak ia mencerminkan permintaan efektif, dan di pihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Investasi diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat dalam suatu negara. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Investasi juga membawa ke arah kemajuan teknologi (Jhingan, 2016).

Investasi merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan dan penambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat (Sukirno, 2016). Dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran berikut:

- 1) Pembelian barang modal seperti mesin-mesin dan berbagai peralatan produksi.
- 2) Pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, kantor, industri dan bangunan lainnya.
- 3) Pertambahan stok pada barang-barang yang belum laku terjual, bahan mentah dan barang yang belum selesai diproduksi.

Beberapa faktor lain juga penting peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi, adalah:

- 1) Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
- 2) Suku bunga.
- 3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
- 4) Kemajuan teknologi.
- 5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
- 6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran yang berikut:

- 1) Pembelian berbagai jenis modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- 2) Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. Pertambahan nilai stok

barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Menurut Profesor Nurkse pembentukan modal ialah, masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatnnya. Dalam arti ini penentuan modal berupa investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional (Jhingan, 2016).

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pemabangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada penanaman modal dapat berupa (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007):

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan masuk atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
- 4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nialai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
- 5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
- 6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Adapun kriteria penanaman modal yang mendapat fasilitas menurut Pasal 18 UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- 1) Menyerap banyak tenaga kerja
- 2) Termasuk skala prioritas tinggi
- 3) Termasuk pembangunan infrastruktur
- 4) Melakukan alih teknologi
- 5) Melakukan industri pionir

- 6) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
- 7) Menjaga keletarian lingkungan hidup
- 8) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- 9) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau
- 10) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

Faktor-faktor penyebab penghambat dalam investasi atau penanaman modal

(Jhinghan, 2016), diantaranya:

- 1) Kebiasaan. Orang lebih suka mencoba usaha yang sudah dikenal daripada yang belum.
- 2) Sempitnya pasar domestik. Karena daya beli rendah, kemampuan pasar domestik untuk menyerap penawaran barang-barang baru menjadi terbatas.
- 3) Kesulitan mendapatkan dana untuk tujuan investasi. Kegiatan seperti manufaktur memerlukan modal besar. Dan itu sulit didapat karena tiadanya pasar modal dan pasar uang, serta lemahnya sistem per kreditan dan perbankan.
- 4) Kurangnya tenaga kerja terampil dan kendornya mobilitas faktor sehingga mempertinggi biaya produksi dan dengan demikian merintangai calon-calon investor.
- 5) Kemampuan wiraswasta sangat langka. Kalaupun ada, ia akan tersingkir oleh tingginya resiko investasi.

Syarat utama pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Kekuatan luar

selayaknya hanya merangsang dan membantu kekuatan nasional (Jhinghan, 2016). Menurut UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang no.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Modal Dalam Negeri adalah, Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah:

- 1) Perseorangan Warga Negara Indonesia.
- 2) Badan Usaha Indonesia.
- 3) Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *foreign direct investment*. Pengertian Penanaman Modal Asing ditemukan dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang no. 11 Tahun 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Adapun Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanam modal asing adalah salah satu cara sebuah negara untuk dapat berkembang. Penanam modal asing dapat meningkatkan persediaan modal ekonomi, menuju produktivitas yang lebih tinggi

dan upah yang lebih besar. Lebih jauh, penanam modal asing adalah salah satu cara mudah bagi negara miskin untuk mempelajari seni penggunaan teknologi yang dikembangkan dan digunakan negara kaya.

Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah:

- 1) Perseorangan Warga Negara Asing.
- 2) Badan Usaha Asing.
- 3) Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Modal asing dapat memasuki suatu negara dalam bentuk modal swasta dan/atau modal negara. Modal asing swasta dapat mengambil bentuk investasi langsung dan investasi tidak langsung (Jhinghan, 2016).

6) Investasi Langsung

Investasi langsung, berarti bahwa perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi itu. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu: pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan suatu perusahaan dalam mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham; pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di negara penanam modal; mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh asset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal.

7) Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung, lebih dikenal sebagai investasi *portofolio* atau *rentier* yang sebagian besar terdiri penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja. Pada tahun-tahun terakhir ini telah berkembang investasi tidak langsung secara multilateral.

D. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif (berusia 15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus pekerjaan rumah tangga atau lainnya selain pekerjaan pribadi.

Tenaga kerja merupakan bagian penting dari sebuah kegiatan ekonomi, yaitu melaksanakan produksi. Diperlukan tenaga kerja berkualitas untuk mencapai hasil produksi yang berkualitas. Produsen dapat mencari tenaga kerja yang berkualitas di pasar tenaga kerja (Aryanti dkk, 2015). Menurut Sukirno (2015), tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bukan saja berarti jumlah pekerja yang terdapat

dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan ketrampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan, yaitu :

1) Tenaga Kerja Kasar

Tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya

2) Tenaga Kerja Terampil

Tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan yang utama adalah terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan untuk dimasuki pencari kerja. Pencari kerja dapat memperoleh kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja inilah terjadi interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pasar tenaga kerja tergantung luas dan sempitnya kegiatan produksi. Pemakaian faktor produksi tenaga kerja ditentukan kebutuhan dunia usaha atau lapangan pekerjaan. Pasar tenaga kerja juga dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran (Aryanti dkk, 2015).

Menurut Mankiw (2014) permintaan untuk faktor produksi, seperti tenaga kerja merupakan permintaan turunan yang muncul dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan faktor-faktor untuk produksi barang dan jasa. Perusahaan kompetitif yang memaksimalkan keuntungan menyewa setiap faktor sampai ke titik

di mana nilai produk marginal setiap faktor tersebut setara dengan harganya.

Perubahan permintaan tenaga kerja dipengaruhi faktor-faktor berikut:

1) Harga Output

Nilai produk marginal adalah marginal produk dikali harga output perusahaan.

Oleh karena itu, ketika harga berubah, nilai produk marginal juga berubah.

2) Perubahan Teknologi

Kemajuan teknologi menaikkan produk marginal tenaga kerja yang kemudian menaikkan permintaan tenaga kerja. Kemajuan teknologi semacam itu menjelaskan peningkatan ketenagakerjaan secara tetap di hadapan kenaikan upah.

3) Penawaran Faktor Lainnya

Ketersedian jumlah satu faktor produksi dapat mempengaruhi produk marginal faktor lainnya.

Penawaran tenaga kerja muncul dari *tradeoff* antara waktu bekerja dan berlibur yang dimiliki oleh seseorang. Keputusan pekerja mengenai perbandingan bekerja-berlibur dibandingkan dengan perubahan dalam biaya kesempatan. Dengan terbatasnya waktu, semakin banyak jam kerja berarti semakin sedikit para pekerja menikmati waktu libur. Artinya, para pekerja merespons pada pekerjaan dalam biaya kesempatan berlibur hanya sedikit mengambil liburan. Perubahan penawaran tenaga kerja dipengaruhi faktor-faktor berikut:

1) Perubahan Selera

Perubahan selera atau sikap terhadap pekerjaan. Satu atau dua generasi sebelumnya, biasanya wanita tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Saat

ini, ukuran keluarga lebih kecil dan lebih banyak ibu rumah tangga memilih untuk bekerja. Hasilnya adalah kenaikan dalam penawaran tenaga kerja.

2) Perubahan Kesempatan Alternatif

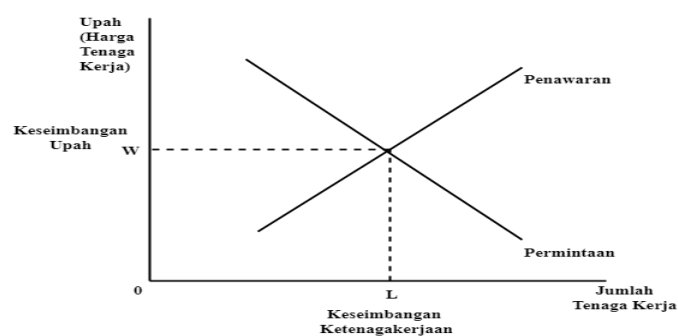
Penawaran tenaga kerja dalam setiap pasar tenaga kerja bergantung pada kesempatan atau peluang yang tersedia dalam pasar tenaga kerja lainnya.

3) Imigrasi

Pergerakan para pekerja dari satu daerah ke daerah lainnya, atau dari satu negara ke negara lainnya, merupakan sumber yang jelas dan penting pada pergerakan penawaran tenaga kerja.

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar kontribusinya dalam menentukan upah di suatu jenis pekerjaan. Didalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya didalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas namun permintaannya sangat besar, upah cenderung mencapai tingkat yang tinggi (Sukirno, 2015). Upah ditentukan dalam pasar tenaga kerja kompetitif adalah upah menyesuaikan keseimbangan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja dan upah setara dengan nilai produk marginal tenaga kerja.

Gambar 3.
Kurva Keseimbangan Dalam Pasar Tenaga Kerja



Sumber: Mankiw, 2014

Gambar 3 menunjukkan pasar tenaga kerja dalam keadaan seimbang. Upah dan jumlah tenaga kerja telah menyesuaikan pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Ketika pasar berada pada titik keseimbangan, setiap perusahaan telah membeli tenaga kerja sebanyak mungkin selama masih memberikan keuntungan pada keseimbangan upah. Yakni, setiap perusahaan telah mengikuti kaidah untuk memaksimalkan laba: perusahaan menyewa para pekerja sampai nilai produk marginal tenaga kerja setara dengan upah. Oleh karena itu, upah harus seimbang dengan marginal produk tenaga kerja ketika perusahaan menyeimbangkan penawaran dan permintaan (Mankiw, 2014).

Upah riil tenaga kerja tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas berarti pekerja tersebut dapat menghasilkan lebih banyak barang pada jangka waktu yang sama, atau suatu tingkat produksi tertentu dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, yang terpenting adalah kemajuan teknologi, penambahan kepandaian dan ketrampilan tenaga kerja, dan perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat (Sukirno, 2015).

Berdasarkan model Lewis, perekonomian terbelakang terdiri atas dua sektor yaitu sektor subsisten pedesaan yang tradisional dan kelebihan penduduk, yang dicirikan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol (*zero marginal labor productivity*). Situasi ini digolongkan Lewis sebagai surplus tenaga kerja (*labor surplus*) karena tenaga kerjanya dapat diambil dari sektor pertanian tradisional tanpa mengakibatkan kerugian output apapun; dan sektor industri modern perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga

kerja dari sektor subsisten secara berangsur-angsur. Fokus utama dari model lewis adalah pada proses transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern. Transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja timbul karena adanya perluasan (ekspansi) output yang dihasilkan sektor modern. Laju perluasan ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Investasi ini dimungkinkan karena jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi bahwa para pemilik modal menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka (Todaro, 2011

Menurut Adam Smith menekan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi tenaga kerja. Setiap tenaga kerja lebih efisien daripada sebelumnya, dalam menghemat waktu. Ia mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. Akhirnya, produksi meningkatkan berbagai hal. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada luas pasar. Luas pasar, sebaliknya, tergantung pada kemajuan ekonomi, yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi, dan sebagainya. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat (Jhinghan, 2016).

Konsep elastisitas kesempatan kerja berkaitan dengan besarnya kesempatan kerja yang tercipta oleh setiap persentase pertumbuhan ekonomi. Elastisitas kesempatan kerja akan semakin tinggi dalam perekonomian suatu negara cenderung lebih bersifat *labour intensive* dibandingkan perekonomian suatu negara yang bersifat *capital intensive*. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi menggambarkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Besarnya kesempatan kerja tergantung

pada permintaan masyarakat atas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Semakin besar permintaan masyarakat atas produk yang dihasilkan suatu perusahaan, semakin luas kesempatan kerja yang disediakan. Setiap sektor ekonomi memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang berbeda-beda (Aryanti dkk, 2015).

Elastisitas kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah:

- 1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain.
- 2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
- 3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya lain.
- 4) Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lain.

E. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan bidang penelitian yang dilakukan, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan *relevan* khususnya penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 4.
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	Ali Abdulkadir Ali, Ali Yassin Sheikh Ali dan Mohamed Saney Dalmar (2018)	<i>The Impact Of Tax Revenues On Economic Growth: A Time Series Evidence From Kenya</i>	Variabel Independen: <i>Tax Revenue, Grants, Foreign Aid</i> dan <i>Other Revenues</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>ordinary least square method</i>	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Pendapatan pajak domestik memiliki dampak signifikan positif pada pertumbuhan ekonomi tetapi hibah (bantuan asing) memiliki dampak negatif terhadap

					pertumbuhan ekonomi.
2	Gbetondji Melaine Armel Nonvide dan Cocou Jaures Amegnaglo (2017)	<i>Effect of Tax Revenues on Economic Growth in Benin: The Role of Investment</i>	Variabel Independen: <i>Tax Revenue, Investment, Population growth</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>Ordinary Least Squares (OLS) Technique</i>	Hasil menunjukkan penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan, investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengaruh pertumbuhan populasi ditemukan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	Oyedokun Godwin Emmanuel dan Ajose Kehinde (2018)	<i>Domestic Investment and Economy Growth in Nigeria: An Empirical Investigation</i>	Variabel Independen: <i>Domestic investment,</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>Model Vector Error Correction Mechanism (VECM)</i>	Hasil menunjukkan bahwa investasi domestik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Rami Hodrob (2017)	<i>The Impact of Foreign Direct Investment on Palestinian Economic Growth</i>	Variabel Independen: <i>Foreign Direct Investment, Domestic Investment, Imports</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>Least square method</i>	Hasil menunjukkan investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan, investasi domestik dan tenaga impor positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
5	Petr Hlavacek dan Beata Bal-Domanska, (2016)	<i>Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central and Eastern European Countries</i>	Variabel Independen: <i>Foreign Direct Investment</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>Endogenous Growth Model</i>	Hasil menunjukan bahwa investasi asing secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

6	Najabat Ali dan Hamid Hussain (2017)	<i>Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth of Pakistan</i>	Variabel Independen: <i>Foreign Direct Investment, inflation rate, exchange rate, interest rate</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>Multiple Regression Analysis</i>	Hasil menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh positif dan signifikan, tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, nilai tukar berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
7	Sayef Bakari (2017)	<i>The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Evidence from Malaysia</i>	Variabel Independen: <i>domestic investment, exports, labors</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>analysis of Vector Error Correction Model and the Granger-Causality tests</i>	Hasil menunjukkan bahwa investasi domestik, ekspor dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif.
8	Maya Aprilia Sari (2018)	<i>Impact of Investment, Labor, and Infrastructure on Java Island Economic Growth 2011-2017</i>	Variabel Independen: <i>Investment, Labor, Infrastructure,</i> Variabel Dependen: <i>Economic Growth</i>	Menggunakan <i>The General Least Square (GLS) method</i>	Hasil menunjukkan bahwa investasi domestik, tenaga kerja, infrastruktur air bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan penanaman modal luar negeri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

F. Kerangka Pemikiran

Aktivitas pembangunan yang dilakukan suatu negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar taraf kemakmuran suatu negara dapat ditingkatkan melalui pendapatan nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas kegiatan ekonomi mengalami kenaikan, sehingga output yang dihasilkan bertambah banyak. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain akumulasi modal dan tenaga kerja. Akumulasi modal dapat diperoleh dari penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Tenaga kerja diperoleh dari penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dalam usia kerja (usia produktif) yang sedang bekerja.

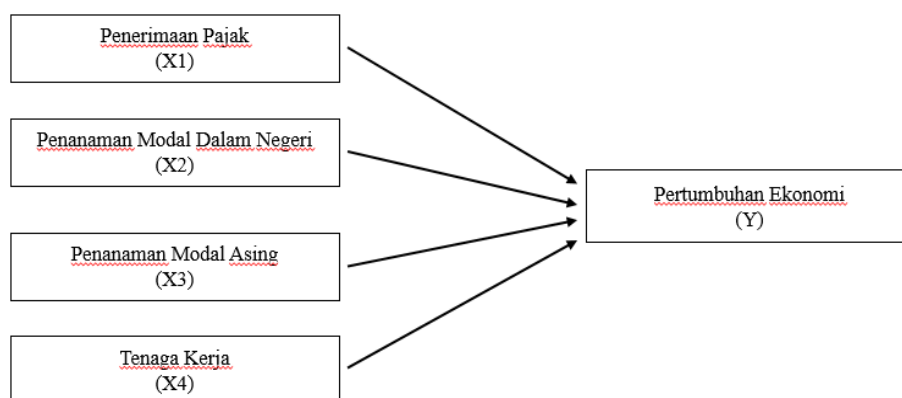
Sumber penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) merupakan sebagai sumber penerimaan yang utama dalam sebuah negara. Pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak memiliki fungsi *budgetair* sebagai pengeluaran pemerintah dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk kepentingan kebijakan pembangunan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Dalam mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan penerimaan negara berupa pajak. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran atau perbelanjaan pemerintah. Dengan perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Investasi atau penanaman modal merupakan sebagai penentu utama pada pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya pembangunan ekonomi penanaman modal atau investasi memiliki peranan penting, dimana modal akan menentukan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan gambaran pembangunan ekonomi suatu negara. Penanaman modal atau investasi merupakan pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu negara akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Penanaman modal dibedakan menjadi dua yaitu, investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta (penanaman modal dalam negeri/PMDN) dan dan investasi oleh pihak luar negeri (penanaman modal asing/PMA). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing terdiri dari dua bentuk yaitu penanaman modal asing secara langsung dan penanaman modal asing secara tidak langsung. Penanaman modal asing secara langsung atau investasi asing langsung adalah bentuk investasi modal yang dimiliki dan dikelola oleh pihak asing.

Sedangkan, penanaman modal asing secara tidak langsung atau disebut investasi asing portofolio adalah bentuk investasi yang dibiayai pihak asing tetapi dioperasikan oleh pihak dalam negeri.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi dalam perekonomian yang akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara dapat menambah produksi. Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat penambahan kepada luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan akan bertambah. Karena perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada penambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi (Sukirno, 2016). Dan dengan penambahan dalam produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi meningkat. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Diduga penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Diduga penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
5. Diduga penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil ruang lingkup wilayah Indonesia. Dipilihnya ruang lingkup Indonesia dikarenakan memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai pengaruh dari variabel *independent* tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai variabel *dependent*.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dalam bentuk tahunan dari masing-masing variabel pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan tenaga kerja, masing-masing 21 tahun dari tahun 1999-2019 di Indonesia. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang diperoleh dengan fasilitas internet yang berguna bagi penelitian ini

Tabel 5.
Jenis dan Sumber Data

No	Jenis Data	Sumber Data
1	PDB ADHK Tahun 2010 Periode 1999-2019	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Penerimaan Pajak Periode 1999-2019	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Penanaman Modal Dalam Negeri Periode 1999-2019	Badan Pusat Statistik (BPS)
4	Penanaman Modal Asing Periode 1999-2019	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Tenaga Kerja Periode 1999-2019	Badan Pusat Statistik (BPS)

C. Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil (Sukirno, 2016).

b. Penerimaan Pajak

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

c. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

d. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

e. Tenaga Kerja

Menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan secara singkat pada Tabel 6.

Tabel 6
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Notasi	Pengukuran	Satuan
1	Pertumbuhan Ekonomi	EG	Diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB riil tahunan menggunakan tahun dasar 2010	Persen
2	Penerimaan Pajak	TAX	Realisasi pendapatan negara terhadap penerimaan perpajakan	Miliar Rupiah
3	Penanaman Modal Dalam Negeri	PMDN	Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri menurut sektor ekonomi	Miliar Rupiah
4	Penanaman Modal Asing	PMA	Realisasi investasi penanaman modal luar negeri menurut sektor ekonomi	Juta US\$
5	Tenaga Kerja	TK	Penduduk berusia 15 tahun ke-atas dan telah bekerja	Juta Jiwa

D. Alat Analisis

Alat analisis empiris yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data runtun waktu (*time series*). Analisis yang berdasarkan runtun waktu mengasumsikan bahwa data runtun waktu yang mendasari adalah stasioner (*stationary*). Untuk data stasioner, permodelan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode OLS digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang antara variabel dependen dan variabel independen penelitian ini.

Namun dalam menjawab permasalahan maka model yang digunakan pada data *time series* ini adalah model koreksi kesalahan atau ECM (*Error Correction Model*) dengan syarat utama bahwa data tidak stasioner di tingkat level, tetapi stasioner pada derajat integrasi dan variabelnya terkointegrasi. Model yang digunakan untuk melakukan koreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang. Dan model regresi berganda menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Model yang digunakan sebagai berikut:

$$EG = f(\text{TAX}, \text{PMDN}, \text{PMA}, \text{TK})$$

Model umum dari regresi berganda yaitu:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_t$$

Model penelitian ini menggunakan model regresi Semi-Log yaitu merupakan model dimana hanya salah satu diantara variabel terikat (Y) atau variabel bebas (X) yang dapat ditransformasi. Dalam penelitian ini menggunakan Linier-Logaritma dimana variabel Y dalam bentuk linear sedangkan variabel X berbentuk logaritma.

Persamaan umum model Lin-Log adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X_t + e_t$$

Model regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu:

$$EG_t = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{TAX}_t + \beta_2 \ln \text{PMDN}_t + \beta_3 \ln \text{PMA}_t + \beta_4 \ln \text{TK}_t + e_t$$

Keterangan:

EG	= Pertumbuhan Ekonomi
TAX	= Penerimaan Pajak
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	= Penanaman Modal Asing
TK	= Tenaga Kerja

β_0 = *intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

e_t = *Error Terms* (faktor kesalahan)

E. Metode Analisis Data

1. Uji Stationeritas (Uji Unit *Root*)

Analisis yang menggunakan data *time series* mengasumsikan secara implisit bahwa pokok *time series* adalah stasioner. Namun dalam praktiknya kebanyakan *time series* ekonomi adalah non stasioner. Secara umum, suatu *time series* (tidak stasioner) harus diturunkan d (*difference*) kali untuk merubahnya menjadi stasioner, *time series* tersebut dikatakan terintegrasi pada urutan d (Gujarati, 2013). Suatu *time series* d terintegrasi pada urutan d dilambangkan sebagai $Y_t \sim I(d)$. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan regresi palsu yang menyebabkan hasil regresi tidak memiliki arti sama sekali.

Salah satu uji stasioneritas (atau nonstasioneritas) yang sering digunakan pada uji data *time series* adalah uji akar unit (uji unit *root*). Apabila sebuah *time series* memiliki unit *root*, turunan pertama dalam *time series* adalah stasioner. Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan sebutan uji *Dickey-Fuller* (DF). Dalam menerapkan uji DF, diasumsikan bahwa *error term* u_t tidak berkorelasi. Tetapi untuk kondisi di mana u_t berkorelasi, Dickey dan Fuller telah membuat uji lain, yang dikenal sebagai uji *augmented Dickey-Fuller* (ADF).

Uji akar unit dengan metode uji *augmented Dickey-Fuller* (ADF) memiliki hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : terdapat unit *root* (data tidak stasioner)

- H_a : tidak terdapat unit *root* (data stasioner)

Hasil t-statistik hasil estimasi pada metode akan dibandingkan dengan nilai kritis *McKinnon* pada nilai kritis 1%, 5% dan 10%.

- Jika nilai t-statistik < nilai kritis *McKinnon* maka H_0 diterima, artinya terdapat unit *root* atau data tersebut non stasioner.
- Jika nilai t-statistik > nilai kritis *McKinnon* maka H_0 ditolak, artinya tidak terdapat unit *root* atau data tersebut stasioner.

2. Uji Kointegrasi (Keseimbangan Jangka Panjang)

Regresi pada sebuah variabel time series atau lebih bisa menghasilkan hasil yang tidak sesuai atau hasil palsu (regresi palsu). Satu cara untuk menjaga dari kemungkinan ini adalah untuk melihat apakah *time series*nya berkointegrasi. Uji kointegrasi digunakan untuk mendeteksi hubungan jangka panjang, atau keseimbangan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Pada uji stasioneritas adalah uji unit *root* pada masing-masing variabel, dan uji kointegrasi adalah uji unit *root* pada residualnya. Uji kointegrasi terintegrasi pada derajat yang sama yang berarti residualnya adalah $I(0)$ (Gujarati, 2013).

Uji kointegrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kointegrasi *Engel-Granger* (EG). Untuk melakukan uji dari *Engel-Granger* (EG) ini kita harus mengestimasi sebuah regresi untuk mendapatkan residualnya, dan akhirnya dilakukan pengujian-pengujian *Dickey-Fuller* (DF) atau *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Hipotesis dalam uji kointegrasi yaitu H_0 : Tidak terdapat Kointegrasi dan H_a : Terdapat Kointegrasi. Kriteria pengujianya adalah:

- Jika nilai t-statistik < nilai kritis *McKinnon* maka H_0 diterima, artinya data tersebut tidak terdapat Kointegrasi.

- Jika nilai t-statistik > nilai kritis *McKinnon* maka H_0 ditolak, artinya data tersebut terdapat kointegrasi.

3. Error Correction Model (ECM)

Salah satu cara untuk mengidentifikasi hubungan di antara variabel yang bersifat nonstasioner adalah dengan melakukan permodelan koreksi kesalahan *Error Correction Model* (ECM). *Error Correction Model* (ECM) pertama kali digunakan oleh Sargan dan kemudian dipopulerkan oleh Engle dan Granger, yang mengoreksinya untuk keadaan ketidakseimbangan (*disequilibrium*). Teori yang penting dari Representasi Granger, menjelaskan bahwa apabila kedua variabel X dan Y adalah kointegrasi, hubungan keduanya bisa dinyatakan sebagai *Error Correction Model* (ECM). Dan secara statistik, nilai *Error Correction Model* (ECM) adalah signifikan.

Secara umum model ECM sebagai berikut:

$$EG = f(\text{TAX}, \text{PMDN}, \text{PMA}, \text{TK})$$

Model ECM dalam penelitian ini menggunakan persamaan:

$$\Delta EG_t = \beta_0 - \beta_1 \Delta \ln TAX_t + \beta_2 \Delta \ln PMDN_t + \beta_3 \Delta \ln PMA_t + \beta_4 \Delta \ln TK_t + \beta_5 ECT_{t-1} + e_t$$

Keterangan:

ΔEG_t = Pertumbuhan Ekonomi

ΔTAX_t = Penerimaan Pajak

$\Delta PMDN_t$ = Penanaman Modal Dalam Negeri

ΔPMA_t = Penanaman Modal Asing

ΔTK_t = Tenaga Kerja

β_0 = *intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

ECT_t = Error Correction Term

e_t = Error Terms (faktor kesalahan)

4. Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Gujarati, 2013). Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tidak terpenuhi, khususnya terhadap ukuran sampel kecil maka hasil uji statistik menjadi tidak valid. Dalam pengujian asumsi normalitas dapat menggunakan pengujian *Jarque Berra* (J-B). Dengan ketentuan apabila:

- Apabila nilai probabilitas *Jarque Berra* (J-B) < 5% (0,05), maka data tidak berdistribusi normal.
- Apabila nilai *Jarque Berra* (J-B) lebih besar dari 5% (0,05), maka data berdistribusi normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan suatu keadaan dimana variansi dari residual tidak bersifat konstan. Model regresi yang baik adalah bersifat

homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Menurut Gujarati (2015) ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, antara lain: metode grafik, uji park, uji glejser, uji korelasi spearman, uji goldfield-quandt, uji Breusch-Pagan-Godfrey dan uji white. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Breusch-Pagan-Godfrey. Cara mendeteksi metode uji Breusch-Pagan-Godfrey dengan melihat *Obs*R-Squared* dan nilai *Chi Squares*. Dengan ketentuan apabila:

- Nilai *Obs*R-Squared* > nilai *Chi Squares*, dan Probabilitas nilai *Chi Squares* > 0,05 menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model tersebut.
- Nilai jika *Obs*R-Squared* < nilai *Chi Squares*, dan Probabilitas nilai *Chi Squares* < 0,05 menandakan terjadi heteroskedastisitas dalam model.

3) Uji Multikolinearitas

Istilah Multikolonieritas mengacu pada Ragnar Fisch. Awalnya, hal tersebut berarti, keberadaan dari hubungan linear yang “sempurna”, atau tepat, di antara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Adapun cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas antar variabel independen.

Analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah *Variance Inflation Factor* (VIF) (Gujarati, 2015). Penelitian ini dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan ketentuan apabila:

- Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.
- Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 maka terdapat multikolinearitas diantara variabel independen.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi di antara anggota seri observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (seperti pada data *time series*) atau tempat (seperti pada data *cross section*). Autokorelasi merupakan penyebab yang akibat data menjadi tidak stasioner, sehingga bila data dapat distasionerkan maka autokorelasi akan hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk membuat data yang tidak stasioner sama dengan transformasi data untuk menghilangkan autokorelasi (Gujarati, 2015). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan dengan dua cara, yaitu Uji Durbin-Watson dan Uji Breusch-Godfrey. Dalam penelitian ini digunakan metode Breusch-Godfrey *Serial Correlation LM Test*. dengan ketentuan apabila:

- Nilai *probability* $>$ dari $\alpha = 5\%$, berarti tidak ada autokolerasi, begitu sebaliknya apabila,
- Nilai *probability* $<$ dari $\alpha = 5\%$, berarti ada autokolerasi.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji statistik t, uji statistik F, dan *Adjusted R²*.

1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi merupakan sebuah prosedur, di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol. Ide kunci dibalik pengujian signifikansi ini adalah bahwa sebuah uji statistik (estimator) dari distribusi sampling dari statistik tersebut dinyatakan oleh hipotesis nol. Keputusan untuk menerima atau menolak H_0 dibuat berdasarkan nilai dari uji statistik yang didapatkan dari data yang dimiliki. Dalam uji signifikansi, sebuah statistik dikatakan signifikan secara statistik jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah kritis. Sebaliknya, sebuah pengujian dikatakan tidak signifikan secara statistik, jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah penerimaan (Gujarati, 2015). Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keputusan peneliti, yaitu 0,01 (1%); 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Prosedur pengujian ini adalah:

- a. membuat hipotesa null (H_0) dan hipotesa alternatif (H_a)
- b. menentukan tingkat keyakinan dan daerah nilai kritis ($Df = n - k - 1$)
- c. keputusan untuk menerima atau menolak H_0 didasarkan pada perbandingan t-hitung dan t-tabel (nilai kritis).

Apabila:

- t-hitung $>$ t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maksudnya ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen secara parsial (individu).
- t-hitung $<$ t-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maksudnya tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen secara parsial (individu).

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keputusan peneliti, yaitu 0,01 (1%); 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Dalam uji F-statistik, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (Gujarati, 2015):

Hipotesis yang digunakan dalam uji F yaitu:

- H_o : Secara bersama sama semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- H_a : Secara bersama-sama semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Keputusan untuk menerima atau menolak H_o didasarkan pada perbandingan F-hitung dan F-tabel. Apabila:

- F-hitung > F-tabel, maka H_o ditolak dan H_a diterima. Maksudnya bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- F-hitung < F-tabel, maka H_o diterima dan H_a ditolak. Maksudnya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3) Koefisien Determinasi (R^2 atau *R-squared*)

Koefisien determinasi, r^2 (untuk kasus dua variabel) atau R^2 (untuk regresi majemuk) merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan seberapa baik sebuah regresi sampel sesuai dengan datanya. Besarnya R^2 merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari

sebuah model regresi. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi atau persentasi dari variasi total pada Y yang dijelaskan oleh modal regresi. Sifat dari R^2 besarnya tidak pernah negatif. Batasannya adalah oleh besarnya nilai R^2 antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai angka 1, berarti variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen dengan semakin baik. Di sisi lain, jika nilai R^2 bernilai angka 0, artinya tidak ada hubungan antara regresi dan regresor (variabel penjelas dengan variabel yang dijelaskan), bagaimanapun bentuknya itu (Gujarati, 2015).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan hasil pengujian jangka pendek dan jangka panjang, penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian dengan jangka pendek dan jangka panjang, penerimaan pajak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas penerimaan pajak lebih kecil dari nilai *p-value*. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak berpengaruh negatif dan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek dan jangka panjang.
2. Pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berdasarkan hasil regresi jangka pendek dan jangka panjang dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian dalam jangka pendek dan jangka panjang penanaman modal dalam negeri signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas penanaman modal dalam negeri lebih kecil dari nilai *p-value*. Hal ini berarti bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada jangka pendek dan jangka panjang.

3. Pengaruh penanaman modal asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berdasarkan hasil regresi jangka pendek dan jangka panjang dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian dalam jangka pendek penanaman modal asing signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas penanaman modal asing lebih kecil dari nilai *p-value*, sedangkan dalam jangka panjang penanaman modal asing tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas penanaman modal asing lebih besar dari nilai *p-value*. Hal ini berarti bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif dan secara signifikan pada jangka pendek dan pada jangka panjang berpengaruh positif dan secara tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
4. Pengaruh tenaga kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi, berdasarkan hasil regresi jangka pendek dan jangka panjang dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian dalam jangka pendek tenaga kerja tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas pengangguran terbuka lebih besar dari nilai *p-value*, sedangkan dalam jangka panjang tenaga kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitas penanaman modal asing lebih kecil dari nilai *p-value*. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan pada jangka pendek dan pada jangka panjang berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
5. Berdasarkan hasil uji simultan terbukti bahwa seluruh variabel bebas yang ada yaitu penerimaan pajak, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal

asing dan tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat kebijakan dibidang anggarannya dalam menetapkan program-programnya agar seimbang sesuai dengan kemampuan penerimaan dalam negeri untuk menghindari terjadinya defisit anggaran. Perlunya melakukan penghematan terhadap pengeluaran rutin pemerintahan secara rasional tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah. Serta pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakannya khususnya dalam menetapkan target penerimaan negara yang terus meningkat. Dimana realisasi terhadap penerimaan negara sendiri cenderung mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berdampak pada pengeluaran yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Perlunya peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dengan adanya investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan terjadi peningkatan output. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga stabilitas makro ekonomi tetap stabil serta menurunkan tingkat suku bunga agar investasi dapat berkembang.
3. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dengan kebijakan pengalokasian anggaran pemerintah khususnya dalam hal pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan latihan keterampilan

serta memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan menciptakan lapangan kerja yang baru untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan semakin banyak penduduk yang bekerja atau yang produktif maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebagai acuan dalam melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, hendaknya dilakukan penelitian dengan mengidentifikasi faktor lain yang berdampak pada penelitian pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memperpanjang periode pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. A., Ali, A. Y., & Dalmar, M. S. (2018). *The Impact Of Tax Revenues On Economic Growth: A Time Series Evidence From Kenya*. *Academic Research International*, 9(3). [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.9\(3\)/ARInt.2018\(9.3-19\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.9(3)/ARInt.2018(9.3-19).pdf)
- Ali, N., & Hussain, H. (2017). *Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth of Pakistan*. *American Journal of Economics*. 7(4), 163-170. <https://www.researchgate.net/publication/319292026>
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aryanti, H. G., dkk. (2015). *Ketenagakerjaan*. Klaten: PT. Cempaka Putih.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2014). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2000-2014*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/07/02/1202/-seri-2000-laju-pertumbuhan-pdb-atas-dasar-harga-konstan-2000-menurut-lapangan-usaha-persen-2000-2014.html> (diakses tanggal 19 Juni 2021)
- Badan Pusat Statistik. (2015-2019). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/3/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html> (diakses tanggal 19 Juni 2021)
- Badan Pusat Statistik. (1986-2021). *Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/529/website_6/1 (diakses tanggal 19 Juni 2021)
- Badan Pusat Statistik. (2019-2020). *Laporan Perekonomian Indonesia, Berbagai Edisi*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2018). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1841/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-sektor-ekonomi.html> (diakses tanggal 7 November 2020)
- Badan Pusat Statistik. (2000-2018). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1089/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-sektor-ekonomi.html> (diakses tanggal 7 November 2020)

- Badan Pusat Statistik. (2007-2020). Realisasi Pendapatan Negara (milyar rupiah). <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html> (diakses tanggal 7 November 2020)
- Badan Pusat Statistik. (1999-2020). Statistik Indonesia, *Statistical Year Book of Indonesia*, beberapa edisi. BPS: Jakarta RI.
- Bakari, S. (2017). *The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Evidence from Malaysia*. Munich Personal RePEc Archive (MPRA). <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79436/>
- Depkeu RI. (1990-2007). DATA POKOK APBN-P 2006 DAN APBN 2007. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Data%20Pokok%20APBN%202007%20-%20Ina.pdf>. (diakses tanggal 29 Februari 2020)
- Emmanuel, O. G., & Kehinde, A. (2018). *Domestic Investment and Economy Growth in Nigeria: An Empirical Investigation*. *International Journal of Business and Social Science*. 9(2). https://www.researchgate.net/publication/324922999_Domestic_Investment_and_Economy_Growth_in_Nigeria_An_Empirical_Investigation
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hlavacek, P., & Bal-Domanska, B. (2016). *Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Central and Eastern European Countries*. *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*. 27(3). 294-303. <http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.27.3.3914>
- Hodrob, R. (2017). *The Impact of Foreign Direct Investment on Palestinian Economic Growth*. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7(4), 550-557. <file:///C:/Users/asus/Downloads/4410-13519-1-PB.pdf>
- Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Keuangan. (2010-2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Berbagai Edisi. Jakarta: Kemenkue RI.
- Mankiw, G. N., Quah, E., & Wilson, P. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro. Edisi Asia. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, G. N. (2018). Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Nonvide, G. M., & Amegnaglo, C. J. (2018). *Effect of Tax Revenues on Economic Growth in Benin: The Role of Investment*. *Journal of Advanced Studies in*

Finance, 8(2), 139-145. <https://www.researchgate.net/publication/339596579>.

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, M. A. (2018). *Impact of Investment, Labor, and Infrastructure on Java Island Economic Growth 2011-2017*. 1 (3), 230-241. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.35151>
- Simanjuntak, T., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembanguna Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Sukirno, S. (2015). *Mikroekonomi, Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi, Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.